

DAFTAR BACAAN

1. BUKU

- Atmojo, Pangih P Dwi, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Jogjakarta, 2002.
- Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi.*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Pemuda Group, Jakarta, 2007.
- , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Munawir, S., *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Muttaqin, Zainal, *Tax Amnesty di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1977.

Subekti dan R. Tjitosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Sutrisno, Deddy dan Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009,. dikutip dari Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, cet VII, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Sutrisno, Deddy, *Hakikat Sengketa Pajak*, Kencana, Jakarta 2015.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herzien Inlandsch Reglement Staatsblad 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4189).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4893).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.

Perdirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

3. WEBSITE

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, “PPh Pasal 4 ayat (2)”, <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2>, dikunjungi pada tanggal 27 September 2019.

Hasif Priyambudi, “Kewajiban: Pengertian, Jenis, Perbedaan, dan Contoh Kewajiban”, <https://www.pintarnesia.com/pengertian-kewajiban/>, dikunjungi pada tanggal 27 September 2019.

HSI Consulting, “SPT Masa&Bupot PPh Pasal 23/26”, <https://hsiconsulting.co.id/wp-content/uploads/2017/09/Sosialisasi-SPT-masa-PPH23.pdf>, 12 April 2017, dikunjungi pada tanggal 20 September 2019.

“Jenis Pajak Pusat”, <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>, dikunjungi pada tanggal 11 September 2019.

Online Pajak, “Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)”, <https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, 29 November 2016, dikunjungi pada 25 Agustus 2019.

Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp. 1339 Triliun”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun>, dikunjungi pada 12 Agustus 2019.

4. JURNAL

Dewi, Farida, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Tanda Tangan Digital Tersertifikasi yang Berinduk (Analisa Komparatif terhadap Kasus DigNotar di Belanda)*, Tesis tidak diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Holle, Erick S, 'Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service', *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011.

Ma'um, Mohammad, Teori Interpretasi Hukum (Upaya Mencari Prinsip Keadilan dan Maksud Hukum), el-faqih: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2, 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Sistem Pengamanan E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.18, 2002.